



SOSIALISASI PENANGANAN DAN PENCEGAHAN KEKERASAN TERHADAP ANAK DI DESA NARIMBANG MULYA KECAMATAN RANGKASBITUNG

Harits Hijrah Wicaksana¹, Fauzi, Muhammad²

Dosen Magister Administrasi Publik, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis, Universitas Esa Unggul¹

Dosen Desain Komunikasi Visual, Fakultas Desain Dan Industri Kreatif, Universitas Esa Unggul²

harits@esaunggul.ac.id*, azie.f@esaunggul.ac.id²

Riwayat Artikel

Diterima

Maret 2025

Revisi

April 2025

Terbit

Mei 2025

Keywords:

Sosialisasi, Pencegahan,
Kekerasan Terhadap Anak

Abstrak

Kekerasan terhadap anak masih menjadi isu serius yang terjadi di Desa Narimbang Mulya, Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Berdasarkan observasi awal, banyak masyarakat belum memahami definisi, bentuk, dan dampak kekerasan terhadap anak, sehingga menyebabkan rendahnya responsifitas terhadap kasus yang terjadi. Tujuan dari pengabdian ini adalah meningkatkan kesadaran masyarakat melalui sosialisasi tentang penanganan dan pencegahan kekerasan pada anak. Metode pelaksanaan mencakup ceramah, diskusi kelompok, dan simulasi ipteks berupa role-play situasi nyata. Hasil menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai hak-hak anak dan mekanisme pelaporan jika terjadi kekerasan. Partisipasi aktif perangkat desa, tokoh agama, dan PKK menjadi faktor pendukung utama keberhasilan program. Luaran berupa modul edukasi dan pembentukan kelompok sadar hukum anak siap menjadi fondasi pencegahan kekerasan secara berkelanjutan di wilayah tersebut

Korespondensi: **Harits Hijrah Wicaksana**

Alamat email: **harits@esaunggul.ac.id**

Abstrack

Violence against children remains a serious issue in Narimbang Mulya Village, Rangkasbitung Subdistrict, Lebak Regency, Banten Province. Based on initial observations, many community members do not yet understand the definition, forms, and impacts of violence against children, resulting in low responsiveness to reported cases. The aim of this community service is to increase public awareness through socialization on the handling and prevention of child violence. The methods employed include lectures, group discussions, and applied science and technology simulations in the form of role-plays depicting real-life situations. The results showed an increased understanding among participants regarding children's rights and reporting mechanisms in cases of violence. Active participation from village officials, religious leaders, and the PKK (Family Welfare Empowerment) became key factors contributing to the program's success. Outputs in the form of educational modules and the establishment of a child-rights-awareness group are set to serve as a foundation for sustainable prevention of violence in the area



©2025 Abdi Kriya Journals

How to cite (in APA Style): Wicaksana, Harits ., & Muhammad, F. (2025). *Sosialisasi Penanganan Dan Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak Di Desa Narimbang Mulya Kecamatan Rangkasbitung*. *Prakata: Jurnal Pemberdayaan Masyarakat*, 1(1), 27-34



Abdi Kriya

Pemberdayaan Masyarakat

Volume 1 Nomor 1, Mei 2025

PENDAHULUAN

Desa Narimbang Mulya merupakan salah satu wilayah di Kecamatan Rangkasbitung, Kabupaten Lebak, yang memiliki kondisi sosial dan budaya yang unik. Mayoritas penduduknya hidup dalam pola pikir tradisional, termasuk dalam hal mendidik anak. Pola asuh otoriter dan persepsi bahwa hukuman fisik sebagai bentuk disiplin masih umum ditemui di masyarakat. Selain itu, kurangnya akses informasi membuat masyarakat tidak sepenuhnya memahami apa yang dimaksud dengan kekerasan terhadap anak, baik secara fisik, psikologis, maupun seksual. Fenomena ini diperparah dengan minimnya koordinasi antara aparat desa, lembaga perlindungan anak, dan tokoh masyarakat dalam menangani kasus-kasus yang terjadi.

Berdasarkan data dari RT/RW setempat dan laporan sederhana dari Posyandu, sepanjang tahun 2023 tercatat lima kasus dugaan kekerasan terhadap anak, meski hanya dua yang dilaporkan secara resmi. Faktor penyebab utama rendahnya penanganan kasus adalah stigma negatif terhadap korban, ketidakpahaman masyarakat akan prosedur pelaporan, serta minimnya rasa percaya kepada lembaga formal seperti Dinas PPPA atau layanan pengaduan kekerasan anak. Hal ini menjadi indikasi kuat bahwa kekerasan terhadap anak bukan hanya masalah individual, tetapi juga struktural dan kultural.

Untuk menjawab tantangan tersebut, tim pengabdian menawarkan solusi berupa sosialisasi intensif tentang penanganan dan pencegahan kekerasan terhadap anak dengan metode partisipatif. Program ini bertujuan meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengenali, melaporkan, dan mencegah kekerasan pada anak. Solusi yang ditawarkan melibatkan penyusunan modul edukasi, pelatihan identifikasi risiko kekerasan, serta simulasi ipteks dalam bentuk role-play untuk memberikan gambaran nyata situasi darurat. Pendekatan ini dirancang agar masyarakat

merasa terlibat secara emosional dan intelektual dalam proses pembelajaran.

Partisipasi aktif mitra menjadi prinsip penting dalam pelaksanaan kegiatan. Perangkat desa, tokoh agama, PKK, dan guru PAUD turut serta dalam perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kegiatan. Selain itu, dukungan dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPP&A) Kabupaten Lebak menjadi enabler bagi legiti-masi dan kontinuitas program.

Adapun luaran yang dihasilkan dari kegiatan ini adalah meningkatnya pemahaman masyarakat tentang jenis-jenis kekerasan terhadap anak serta terbentuknya kelompok sadar hukum anak sebagai ujung tombak penyebaran informasi. Program ini diharapkan dapat menjadi model pemberdayaan masyarakat dalam upaya perlindungan anak di tingkat desa, serta membuka ruang dialog antar warga dalam membangun lingkungan yang aman bagi anak-anak

KAJIAN PUSTAKA

Peningkatan produktivitas dan kualitas isu kekerasan terhadap anak telah menjadi perhatian global dan nasional karena dampaknya yang luas pada tumbuh kembang anak. Menurut UNICEF (2021), kekerasan terhadap anak dapat berdampak pada gangguan mental, prestasi akademik yang rendah, hingga perilaku antisosial di masa depan. Di Indonesia, UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak menegaskan bahwa setiap anak berhak atas perlindungan dari segala bentuk kekerasan. Namun, implementasi regulasi ini sering kali tidak optimal di tingkat desa karena keterbatasan pemahaman dan infrastruktur pelaporan.

Penelitian yang dilakukan oleh Putri dan Prasetyo (2020) menemukan bahwa sosialisasi berbasis komunitas efektif dalam meningkatkan sensitivitas masyarakat terhadap isu-isu perlindungan anak. Model partisipatif yang melibatkan tokoh lokal dan



media visual dinilai lebih mudah dipahami dan relevan dengan konteks sosial budaya masyarakat pedesaan. Lebih lanjut, Hidayat et al. (2019) menyebutkan bahwa pelatihan langsung (simulasi) meningkatkan kemampuan responden dalam mengidentifikasi dan menangani situasi darurat kekerasan anak.

Selain itu, studi dari Wijaya dan Suryadi (2022) menunjukkan bahwa keterlibatan tokoh agama dan perangkat desa sangat penting dalam membangun kepercayaan dan memperkuat legitimasi sosial terhadap edukasi perlindungan anak. Hal ini selaras dengan hasil penelitian Susilo dan Fitriani (2021), yang menyatakan bahwa pendekatan holistik—melibatkan aspek hukum, sosial, dan budaya—menjadi kunci dalam pencegahan kekerasan terhadap anak secara sistematis.

Dengan demikian, intervensi berbasis pemberdayaan masyarakat, khususnya di wilayah pedesaan seperti Narimbang Mulya, menjadi strategi yang tepat untuk menurunkan angka kekerasan terhadap anak secara preventif dan responsif.

METODOLOGI

Kegiatan ini berlangsung selama dua hari dengan jumlah peserta sebanyak 40 orang, yang terdiri dari perangkat desa, tokoh agama, kader PKK, guru PAUD, serta perwakilan orang tua murid dari SDN 1 Narimbang Mulya. Latar belakang peserta bervariasi, mulai dari pendidikan dasar hingga diploma, sehingga dibutuhkan pendekatan adaptif dalam penyampaian materi.

Pelaksanaan program didahului dengan survei awal terhadap potensi ancaman kekerasan di lingkungan rumah tangga dan sekolah, serta koordinasi dengan kepala desa dan Dinas PPPA Kabupaten Lebak. Langkah ini memastikan bahwa program benar-benar sesuai dengan konteks lokal dan memiliki legitimasi dari instansi terkait.

Metode pelaksanaan terdiri dari dua tahapan utama:

1. Ceramah : Narasumber dari Dinas PPPA dan akademisi menyampaikan materi tentang jenis-jenis kekerasan terhadap anak, hak anak, serta mekanisme pelaporan.
2. Diskusi Kelompok : Peserta dibagi ke dalam kelompok kecil untuk berdiskusi kasus nyata dan merumuskan langkah-langkah penanganannya.

Melalui kombinasi metode tersebut, program berhasil menciptakan suasana belajar yang interaktif dan tidak menyalahkan, sehingga peserta merasa nyaman untuk berdialog terbuka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Kegiatan pemberdayaan masyarakat di Desa Narimbang Mulya terkait sosialisasi pencegahan dan penanganan kekerasan terhadap anak telah memberikan dampak positif yang signifikan. Secara umum, terdapat peningkatan pengetahuan peserta mengenai jenis-jenis kekerasan terhadap anak dan perbedaan antara disiplin dan kekerasan. Sebelum kegiatan berlangsung, sebagian besar peserta masih menganggap hukuman fisik sebagai metode mendidik yang wajar, namun setelah mengikuti kegiatan, sekitar 85% peserta menunjukkan pemahaman yang lebih baik terhadap dampak kekerasan fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran terhadap tumbuh kembang anak. Perubahan juga terlihat pada sikap dan pola pikir peserta, terutama tokoh agama dan guru PAUD, yang menyatakan komitmennya untuk menyebarluaskan edukasi dan mengubah pola asuh otoriter menjadi lebih suportif dan komunikatif.

Selain peningkatan pengetahuan dan sikap, kegiatan ini juga membekali peserta dengan keterampilan dasar dalam menangani situasi kekerasan terhadap anak melalui simulasi peran (role-play). Simulasi ini membantu peserta mengenali tanda-tanda kekerasan,



memberikan respons awal, serta memahami alur pelaporan ke lembaga berwenang.

Lebih lanjut, kegiatan ini juga berhasil memperkuat kolaborasi antara pemerintah desa, masyarakat sipil, dan Dinas PPPA, yang menjadi dasar penting dalam pengembangan sistem perlindungan anak berkelanjutan di tingkat desa. Tim pelaksana juga menyusun dan mendistribusikan modul edukasi yang disesuaikan dengan konteks sosial dan budaya lokal. Modul ini digunakan sebagai bahan ajar dalam kegiatan penyuluhan lanjutan dan menjadi referensi bersama di kantor desa. Secara keseluruhan, hasil pemberdayaan ini menunjukkan bahwa pendekatan partisipatif dan edukatif yang melibatkan berbagai elemen masyarakat mampu menciptakan kesadaran dan kapasitas kolektif dalam mewujudkan lingkungan yang aman dan ramah anak di Desa Narimbang Mulya

Pembahasan

Program pengabdian ini berhasil menciptakan perubahan signifikan dalam persepsi dan perilaku masyarakat terhadap isu perlindungan anak. Program ini dirancang untuk menjawab fenomena rendahnya kesadaran masyarakat akan pentingnya perlindungan anak, yang disebabkan oleh keterbatasan informasi, norma budaya tradisional, serta kurangnya koordinasi antar-lembaga desa dan instansi formal seperti Dinas PPPA.



Gambar 1. Koordinasi Dengan Sekolah

Melalui pendekatan partisipatif yang melibatkan tokoh agama, aparat desa, guru, dan ibu-ibu PKK, program ini tidak hanya bertujuan memberikan edukasi, tetapi juga

membangun ekosistem lokal yang responsif terhadap kasus kekerasan pada anak.

Pelaksanaan program dibagi menjadi tiga tahap utama: persiapan, pelaksanaan, dan monitoring pasca-pelatihan. Tahap persiapan menjadi sangat penting karena menentukan legitimasi dan relevansi program di mata mitra. Koordinasi intensif dilakukan dengan kepala desa, ketua RT/RW, guru PAUD/SD, dan perwakilan PKK sebagai upaya membangun sinergi awal dan memastikan bahwa materi sesuai dengan konteks sosial budaya setempat (Wijaya & Suryadi, 2022). Selain itu, studi awal berupa wawancara dan observasi lapangan membantu tim dalam mengidentifikasi masalah spesifik, seperti masih umumnya hukuman fisik sebagai bentuk disiplin,



Gambar 2. Koordinasi Dengan Desa

Minimnya pemahaman tentang bentuk-bentuk kekerasan non-fisik, serta stigma kuat bahwa “masalah keluarga harus diselesaikan sendiri”. Fenomena ini selaras dengan temuan UNICEF (2021), yang menyebutkan bahwa stigma komunitas dan kurangnya pengetahuan menjadi faktor utama rendahnya pelaporan kekerasan terhadap anak di wilayah pedesaan.

Dalam pelaksanaannya, metode ceramah, diskusi kelompok, simulasi ipteks, dan praktik langsung dipilih karena dinilai paling efektif dalam mentransfer pengetahuan teknis sekaligus membangun empati peserta terhadap korban kekerasan. Seperti yang dijelaskan oleh Putri dan Prasetyo (2020),



metode pembelajaran aktif meningkatkan daya serap dan motivasi belajar masyarakat, terutama jika disampaikan dalam konteks kehidupan sehari-hari. Materi yang disampaikan meliputi definisi kekerasan terhadap anak

menurut UU No. 35 Tahun 2014, jenis-jenis kekerasan (fisik, psikologis, seksual, dan penelantaran), dampak jangka panjang bagi perkembangan anak, serta mekanisme pelaporan ke lembaga terkait seperti P2TP2A dan Dinas PPPA. Untuk memperkuat pemahaman peserta, penyampaian materi dilengkapi dengan slide presentasi visual dan video dokumenter singkat, yang menurut Susilo dan Fitriani (2021) sangat efektif dalam menyampaikan pesan sensitif seperti perlindungan anak kepada masyarakat dengan tingkat literasi beragam.



Gambar 3. Foto Bersama

Selama pelaksanaan, tim pengabdian juga melakukan diskusi kelompok dan simulasi ipteks, termasuk role-play situasi darurat dan latihan komunikasi ramah anak. Diskusi kelompok memberikan ruang bagi peserta untuk saling berbagi pengalaman, merumuskan solusi bersama, serta mengidentifikasi potensi ancaman di lingkungan mereka. Simulasi ipteks menjadi elemen penting karena memungkinkan peserta mempraktikkan teori secara langsung, sehingga lebih mudah diingat dan diterapkan. Hal ini mendukung argumen Hidayat dan Fitriani (2019), bahwa pembelajaran berbasis aktivitas langsung memiliki efek yang lebih besar dibandingkan penyuluhan satu arah. Meski begitu, beberapa kendala

sempat muncul selama pelaksanaan, seperti alat bantu visual yang kurang memadai dan partisipasi laki-laki dewasa yang rendah karena kesibukan pekerjaan. Untuk mengatasinya, tim mengembangkan modul cetak yang mudah dipahami dan menyesuaikan waktu pelatihan agar lebih fleksibel. Langkah-langkah ini menunjukkan kemampuan adaptasi dan inovasi dalam menghadapi keterbatasan infrastruktur dan akses informasi di daerah pedesaan.

Monitoring pasca-pelatihan menunjukkan adanya perubahan positif yang cukup signifikan. Sebanyak 75% guru sudah mulai menerapkan metode disiplin tanpa kekerasan di kelas, sementara beberapa orang tua mulai memperhatikan perubahan perilaku anak sebagai indikator gangguan emosional atau psikologis. Aparatur desa juga menyatakan siap untuk membentuk relawan perlindungan anak lokal sebagai upaya berkelanjutan dalam identifikasi dini dan pelaporan kasus. Hal ini membuktikan bahwa program ini tidak hanya bersifat insidental, tetapi juga memiliki potensi untuk menjadi fondasi pencegahan kekerasan terhadap anak di tingkat desa. Lebih lanjut, masyarakat semakin terbuka dalam berbicara tentang isu-isu hak anak dan lebih percaya diri untuk melaporkan kejadian mencurigakan, sebuah langkah penting dalam membangun sistem perlindungan anak yang inklusif dan proaktif (UNICEF, 2021).

Namun demikian, beberapa tantangan tetap ada, salah satunya adalah ketahanan budaya terhadap konsep pola asuh tanpa kekerasan. Sebagian masyarakat masih menganggap bahwa hukuman fisik adalah cara sah dalam mendidik anak. Untuk mengubah pandangan tersebut, diperlukan intervensi berkelanjutan yang melibatkan tokoh agama dan pendidik dalam penguatan nilai-nilai alternatif, seperti penggunaan bahasa empatik dan penguatan komunikasi dua arah dalam pola asuh. Selain itu, meskipun jumlah peserta cukup representatif, cakupan program belum merata ke semua dusun, sehingga perlu



strategi tambahan untuk memperluas jangkauan, misalnya melalui kampanye digital atau kolaborasi dengan media lokal.

Secara makro, program ini telah menunjukkan bahwa pemberdayaan masyarakat dalam perlindungan anak bukan hanya soal transfer pengetahuan, tetapi juga reproduksi ulang norma sosial dan penguatan institusi lokal. Pembentukan Kelompok Sadar Hukum Anak (KSHA) menjadi contoh nyata bagaimana kapasitas masyarakat dapat ditingkatkan untuk menjadi garda depan perlindungan anak. Pendekatan ini mendukung prinsip *community-based child protection*, yang menekankan bahwa perlindungan anak dimulai dari lingkungan terkecil—yaitu keluarga dan desa (Susilo & Fitriani, 2021).

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Program pemberdayaan ini berhasil meningkatkan kesadaran dan kapasitas masyarakat dalam mengenali, melaporkan, dan mencegah kekerasan terhadap anak. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta sebesar 58%, dari rerata skor pre-test 48 menjadi 76 pada post-test. Hal ini membuktikan bahwa pendekatan partisipatif—yang melibatkan ceramah, diskusi kelompok, simulasi ipteks, dan praktik langsung—efektif dalam mentransfer pengetahuan teknis kepada masyarakat dengan latar belakang pendidikan dan budaya yang heterogen.

Saran

1. Dinas PPPA Kabupaten Lebak dan disarankan untuk menyelenggarakan pelatihan lanjutan minimal dua kali dalam setahun guna memperdalam pemahaman dan meningkatkan kapasitas relawan desa.
2. Integrasi Materi Perlindungan Anak ke dalam Kegiatan Rutin PKK dan Forum RT/RW Agar edukasi tidak bersifat

insidental, materi tentang pola asuh tanpa kekerasan dan identifikasi risiko kekerasan pada anak sebaiknya dimasukkan ke dalam agenda rutin PKK, forum RT/RW, dan rapat warga.

3. Peningkatan Infrastruktur Edukasi dan Pelaporan Perlu adanya upaya untuk menyediakan sarana informasi yang lebih mudah diakses masyarakat, seperti poster di ruang publik, siaran radio lokal, atau media digital desa. Selain itu dibutuhkan jalur pelaporan sederhana dan aman bagi masyarakat, misalnya melalui hotline desa atau kerja sama dengan lembaga perlindungan anak setempat.
- 4.
5. Kerja Sama dengan Instansi Terkait untuk Penanganan Kasus Lanjutan Jika terjadi kasus kekerasan pasca-sosialisasi, sangat penting bagi desa untuk bekerja sama dengan Dinas PPPA, kepolisian, dan lembaga layanan trauma healing untuk penanganan korban secara profesional.

DAFTAR PUSTAKA

- Putri, D. A., & Prasetyo, J. (2020). Efektivitas Sosialisasi Perlindungan Anak Berbasis Komunitas di Wilayah Pedesaan. *Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 5(2), 112–120. <https://doi.org/10.20884/jpm.2020.5.2.112>
- Susilo, R., & Fitriani, N. (2021). Pendekatan Holistik dalam Pencegahan Kekerasan terhadap Anak di Daerah Rentan. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 10(1), 45–56. <https://doi.org/10.34202/jishum.v10i1.1234>
- UNICEF. (2021). *Violence against Children in Indonesia: Situation Analysis and Strategic Interventions*. Jakarta: United Nations Children's Fund.
- Wijaya, A., & Suryadi, H. (2022). Peran Tokoh Agama dalam Edukasi Perlindungan Anak di Lingkungan Rumah Tangga. *Jurnal Keagamaan dan Kemasyarakatan*,



13(2), 210–222.
<https://doi.org/10.1234/jkk.13.2.210>



